



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	13 (tiga belas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT PLN (Persero), PT KAI (Persero) dan PT BPUI (Persero).
Hari, Tanggal	:	Rabu, 1 September 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penjelasan terhadap usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2022
Hadir	:	1. 42 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Direktur Utama PT PLN (Persero); b. Direktur Utama PT KAI (Persero); c. Wakil Direktur Utama PT BPUI (Persero); d. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT KAI (Persero) dan Wakil Direktur Utama PT BPUI (Persero) pada pukul 10.28 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT KAI (Persero) dan Wakil Direktur Utama PT BPUI (Persero) pada hari Rabu, 1 September 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero), mengenai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5 Trilyun yang akan digunakan untuk:
 - a. Pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor pembangkit EBT, transmisi, distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan Pembangkit EBT Penunjang Program Lisdes.
 - b. Pembiayaan Percepatan Pembangunan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 berdasarkan penugasan dari Kemenko Marves & KESDM, yaitu untuk DPSP Likupang, DPSP Danau Toba, DPSP Labuan Bajo, DPSP Mandalika, dan DPSP Borobudur.
2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT KAI (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4,1 Trilyun yang akan digunakan untuk membiayai *cost overrun* pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Komisi VI DPR RI meminta PT KAI (Persero) untuk melakukan audit investigasi terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Wakil Direktur Utama PT BPUI (Persero) mengenai upaya pencarian dana internal BPUI sebesar Rp 6,7 Trilyun yang akan digunakan untuk melanjutkan proses restrukturisasi Jiwaseraya.
4. Komisi VI DPR RI akan mengambil keputusan terkait dengan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat kerja dengan Menteri BUMN RI.
5. Memberikan waktu kepada PT PLN (Persero), PT KAI (Persero) dan PT BPUI (Persero) selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.55 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



Aria Bima
A-189